



Konflik Ideologi Antargenerasi dalam Percepatan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945

Elsadai Valencia Hutagaol^{1)*}, Sofia Andira¹⁾, Tania Alexandra Tambunan¹⁾,
Tiwi Yoselin Simanjuntak¹⁾, Flores Tanjung¹⁾

Universitas Negeri Medan

*Korespondensi: elsadaivalencia@gmail.com

ABSTRAK

Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945, terjadi perbedaan pandangan di antara para tokoh pergerakan nasional antara golongan muda yang bersikap revolusioner dan golongan tua yang mengutamakan pendekatan diplomatis. Penelitian ini bertujuan menganalisis konflik ideologi antargenerasi tersebut serta menjelaskan perannya sebagai faktor struktural dalam percepatan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis melalui studi pustaka terhadap buku sejarah, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa golongan muda mendorong proklamasi segera dilaksanakan tanpa menunggu persetujuan Jepang karena memandang kekalahan Jepang sebagai momentum yang harus dimanfaatkan. Sebaliknya, golongan tua memilih strategi diplomasi dengan mempertimbangkan stabilitas politik dan legitimasi internasional melalui lembaga seperti BPUPKI dan PPKI. Ketegangan kedua golongan mencapai puncaknya dalam Peristiwa Rengasdengklok yang pada akhirnya menghasilkan kompromi politik dan mempercepat lahirnya proklamasi pada 17 Agustus 1945. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan konflik ideologis antargenerasi sebagai variabel analitis utama, bukan sekadar latar peristiwa historis, sehingga memperkaya perspektif historiografi kemerdekaan Indonesia.

Kata Kunci: Kolonialisme Belanda; Golongan Muda; Golongan Tua; Revolusi; Diplomasi; Proklamasi Kemerdekaan.

This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Kolonialisme merupakan salah satu fenomena penting dalam sejarah dunia yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan politik, ekonomi, dan sosial di berbagai wilayah yang berada di bawah kekuasaan bangsa penjajah. Dalam perspektif sejarah global, kolonialisme tidak hanya berkaitan dengan penguasaan wilayah secara militer, tetapi juga mencakup dominasi ekonomi, politik, serta pembentukan struktur sosial yang menguntungkan pihak kolonial. Dalam historiografi kolonialisme, terdapat beberapa karya seminal yang menjadi rujukan utama. Edward Said (1978) dalam *Orientalism* meletakkan dasar teoritis tentang bagaimana wacana kolonial membentuk representasi "Timur" oleh kekuatan Barat, sementara Frantz Fanon (1963) dalam *The Wretched of the Earth* mengkaji dampak psikologis dan sosial kolonialisme terhadap kaum terjajah. Di ranah historiografi Indonesia, Benedict Anderson (2006) dan George McTurnan Kahin (2013) telah merintis kajian mendalam tentang proses pembentukan nasionalisme dan negara-bangsa Indonesia dalam konteks kolonialisme dan dekolonisasi. Menurut Ania Loomba (2005), kolonialisme merupakan suatu sistem kekuasaan yang melibatkan penguasaan wilayah oleh bangsa asing yang disertai dengan eksploitasi sumber daya alam serta pembentukan hierarki sosial yang menempatkan masyarakat pribumi dalam posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok kolonial. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan sosial dan ekonomi yang kemudian memicu munculnya gerakan perlawanan dari masyarakat yang dijajah. Dinamika tersebut pada gilirannya membentuk kesadaran kolektif masyarakat terjajah untuk merebut kembali kedaulatan mereka, sebagaimana yang terwujud dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu wilayah yang mengalami kolonialisme dalam waktu yang sangat panjang, terutama di bawah kekuasaan Belanda. Kekuasaan kolonial Belanda di wilayah Nusantara berkembang secara bertahap sejak masa aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh Perusahaan Dagang Hindia Timur Belanda

(VOC) pada abad ke-17 hingga terbentuknya pemerintahan kolonial yang lebih terstruktur setelah pembubaran VOC pada tahun 1799. Selama masa kolonial tersebut, berbagai kebijakan ekonomi diterapkan oleh pemerintah kolonial untuk memaksimalkan keuntungan bagi negara Belanda. Salah satu kebijakan yang paling terkenal adalah sistem tanam paksa yang diterapkan pada abad ke-19. Menurut M. C. Ricklefs (2010), sistem tanam paksa memberikan keuntungan ekonomi yang sangat besar bagi Belanda, tetapi di sisi lain menimbulkan penderitaan yang berat bagi masyarakat pribumi karena mereka harus bekerja di bawah tekanan serta kehilangan sebagian besar hasil pertanian mereka.

Dampak dari kebijakan kolonial tersebut kemudian memunculkan berbagai bentuk perlawanan dari masyarakat Indonesia. Pada tahap awal, perlawanan terhadap kolonialisme Belanda umumnya dilakukan melalui perjuangan fisik yang dipimpin oleh berbagai kerajaan dan tokoh lokal. Beberapa perlawanan besar yang terjadi antara lain Perang Jawa yang dipimpin oleh Diponegoro, serta Perang Aceh yang berlangsung dalam waktu yang sangat panjang di wilayah Aceh. Meskipun perlawanan tersebut menunjukkan semangat perjuangan yang tinggi, sebagian besar perlawanan tersebut bersifat regional dan belum memiliki koordinasi nasional yang kuat sehingga akhirnya dapat dipadamkan oleh kekuatan militer kolonial.

Memasuki awal abad ke-20, pola perjuangan masyarakat Indonesia mulai mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut tidak terlepas dari berkembangnya pendidikan modern yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial melalui kebijakan Politik Etis. Meskipun kebijakan ini pada awalnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi, dalam praktiknya kebijakan tersebut justru melahirkan kelompok masyarakat terpelajar yang kemudian menjadi pelopor dalam gerakan nasional Indonesia. Menurut George McTurnan Kahin (2013), munculnya golongan terpelajar menjadi faktor penting dalam perkembangan nasionalisme Indonesia karena mereka mulai mengembangkan kesadaran kolektif mengenai identitas kebangsaan serta pentingnya perjuangan untuk mencapai kemerdekaan.

Beberapa organisasi pergerakan nasional yang muncul pada awal abad ke-20 antara lain Budi Utomo yang didirikan pada tahun 1908, Sarekat Islam yang berkembang pesat sebagai organisasi massa, serta Indische Partij yang secara terbuka menyuarakan gagasan kemerdekaan Indonesia. Keberadaan organisasi-organisasi tersebut menandai munculnya gerakan nasional yang lebih terorganisasi dan memiliki tujuan politik yang lebih jelas dibandingkan dengan perlawanan-perlawanan sebelumnya. Perkembangan perjuangan nasional Indonesia semakin mengalami dinamika yang signifikan ketika terjadi Perang Dunia II. Pada tahun 1942, Belanda mengalami kekalahan dari Jepang sehingga kekuasaan kolonial di Indonesia berpindah tangan kepada pemerintahan militer Jepang.

Pendudukan Jepang di Indonesia membawa perubahan yang cukup besar dalam struktur politik dan sosial masyarakat. Meskipun Jepang menerapkan pemerintahan yang bersifat otoriter, pemerintah Jepang juga memberikan ruang politik tertentu bagi tokoh-tokoh nasional Indonesia. Menurut Benedict Anderson (2006), masa pendudukan Jepang menjadi salah satu fase penting dalam proses pembentukan negara Indonesia modern karena pada masa tersebut para tokoh nasional memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam berbagai lembaga politik dan administratif yang kelak menjadi pengalaman penting dalam membangun pemerintahan nasional.

Menjelang berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945, situasi politik internasional mengalami perubahan yang sangat cepat. Kekalahan Jepang menciptakan kondisi yang tidak stabil di berbagai wilayah yang sebelumnya berada di bawah kendali Jepang. Di Indonesia, kondisi tersebut menciptakan kekosongan kekuasaan yang kemudian dimanfaatkan oleh para tokoh pergerakan nasional untuk mempercepat proses menuju kemerdekaan. Namun dalam proses tersebut muncul perbedaan pandangan antara golongan muda dan golongan tua. Golongan tua yang terdiri dari tokoh-tokoh seperti Sukarno dan Mohammad Hatta cenderung memilih pendekatan diplomatis dengan mempertimbangkan situasi politik dan keamanan yang lebih luas. Di sisi lain, golongan muda yang diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Sutan Sjahrir, Wikana, dan Chairul Saleh menginginkan agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan tanpa menunggu persetujuan dari pihak Jepang.

Menurut Sartono Kartodirdjo (1993), perbedaan pandangan antara golongan muda dan golongan tua mencerminkan adanya perbedaan generasi serta pengalaman politik yang memengaruhi cara pandang masing-masing kelompok dalam menghadapi situasi revolusioner pada saat itu. Perbedaan strategi tersebut akhirnya memunculkan berbagai dinamika politik menjelang terjadinya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengasdengklok menunjukkan bagaimana golongan muda berusaha mendesak para pemimpin nasional agar

segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu keputusan dari pihak Jepang.

Kajian mengenai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia telah cukup banyak dilakukan, namun sebagian besar masih terbatas pada pendekatan naratif-kronologis yang mendeskripsikan rangkaian peristiwa tanpa menganalisis secara mendalam faktor ideologis yang melatarbelakanginya. Wifaqi dan Chamidah (2024) membahas proklamasi 1945 sebagai tonggak sejarah, tetapi kajian tersebut lebih bersifat deskriptif historis dan tidak mengelaborasi dinamika perbedaan ideologi antara golongan muda dan golongan tua sebagai variabel yang menentukan. Suryana dan Permana (2022) mengkaji gerakan pemuda dalam konteks konstruksi identitas nasional, namun fokusnya lebih pada dimensi sosiologis pergerakan secara umum. Adapun Kumalasari dan Efendi (2023) yang menyoroti dinamika antara diplomasi dan revolusi menjelang proklamasi, belum menganalisis secara sistematis bagaimana ketegangan ideologis antargenerasi berperan sebagai faktor struktural dalam proses pengambilan keputusan proklamasi. Berdasarkan penelusuran tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang nyata: belum ada kajian yang secara eksplisit dan terstruktur menempatkan perbedaan ideologi golongan muda dan golongan tua bukan sekadar sebagai latar belakang peristiwa, melainkan sebagai faktor penentu independen yang membentuk dinamika dan percepatan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan analisis ideologis yang lebih mendalam dan sistematis.

Bertolak dari kesenjangan kajian tersebut, penelitian ini bertujuan merekonstruksi perbedaan ideologis antara golongan muda dan golongan tua sebagai kekuatan dialektis yang secara langsung mendorong percepatan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan konflik ideologis antargenerasi sebagai variabel analitis utama – bukan sekadar latar belakang peristiwa – yang membentuk arah dinamika politik menjelang proklamasi. Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian historiografi Indonesia dengan menawarkan perspektif analitis baru tentang bagaimana kompromi antara pendekatan revolusioner dan diplomatis menghasilkan keputusan sejarah yang menentukan bagi lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan historis. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam fenomena sosial dan politik dalam konteks sejarah, khususnya terkait perbedaan ideologi dan strategi perjuangan antara golongan muda dan golongan tua menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Creswell dan Creswell (2018) menegaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang tepat untuk mengeksplorasi makna yang dibangun secara sosial di balik suatu peristiwa, melalui interpretasi mendalam terhadap berbagai sumber data yang relevan.

Pendekatan historis diterapkan untuk menelusuri dan merekonstruksi peristiwa masa lalu secara sistematis dan kritis berdasarkan sumber-sumber sejarah yang tersedia. Tujuan pendekatan ini adalah memahami konteks sosial, politik, dan ideologis yang melatarbelakangi perbedaan pandangan antara golongan muda dan golongan tua dalam proses percepatan kemerdekaan Indonesia. Kuntowijoyo (2013) menjelaskan bahwa penelitian sejarah merupakan upaya merekonstruksi masa lalu secara objektif dengan memanfaatkan berbagai sumber yang dapat diverifikasi kebenarannya.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka (library research). Teknik ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian, meliputi buku-buku sejarah, artikel jurnal ilmiah, dokumen sejarah, arsip, serta berbagai publikasi ilmiah lainnya yang relevan. Zed (2014) menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka dengan menjadikan sumber-sumber literatur sebagai data primer dalam menganalisis suatu permasalahan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi sumber, pembacaan kritis, serta pencatatan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap identifikasi sumber, peneliti mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya yang membahas dinamika hubungan antara golongan muda dan golongan tua. Selanjutnya, pada tahap pembacaan kritis, peneliti melakukan analisis terhadap isi sumber-sumber tersebut untuk menemukan informasi yang berkaitan dengan perbedaan ideologi, strategi perjuangan, serta dinamika

politik yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan. Secara lebih rinci, tahapan penelitian ini mengikuti prosedur metode sejarah yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo (2013), yaitu: (1) heuristik, yakni pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan berupa buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait; (2) kritik sumber, yaitu verifikasi keaslian dan keabsahan sumber baik secara internal maupun eksternal; (3) interpretasi, yakni penafsiran fakta-fakta sejarah yang diperoleh untuk membangun analisis yang koheren; dan (4) historiografi, yaitu penulisan hasil penelitian secara sistematis dan ilmiah.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (2014), analisis data kualitatif meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, informasi yang telah dianalisis disusun secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif sehingga mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses interpretasi terhadap data yang telah dianalisis untuk memahami bagaimana perbedaan ideologi antara golongan muda dan golongan tua mempengaruhi strategi perjuangan dan proses percepatan kemerdekaan Indonesia. Perlu dicatat bahwa meskipun kerangka Miles dan Huberman lazim digunakan dalam penelitian ilmu sosial kontemporer, penerapannya dalam penelitian sejarah ini disesuaikan dengan karakteristik sumber-sumber sejarah. Dalam konteks penelitian sejarah, proses reduksi data dimaknai sebagai seleksi dan kritik sumber, penyajian data sebagai narasi historiografis, serta penarikan kesimpulan sebagai interpretasi historis yang berpijak pada konteks zaman. Dengan demikian, kerangka analisis ini digunakan sebagai panduan prosedural yang melengkapi, bukan menggantikan, pendekatan historis yang menjadi landasan utama penelitian ini (Herlina, 2020).

Melalui tahapan analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika pemikiran dan strategi perjuangan yang berkembang di kalangan tokoh pergerakan nasional menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Munculnya Golongan Muda dan Golongan Tua

Kemunculan dua golongan dengan orientasi ideologi berbeda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia merupakan produk dari akumulasi pengalaman sosial, politik, dan ideologis yang berlangsung dalam kurun panjang pergerakan nasional. Kartodirdjo (1993) menegaskan bahwa perbedaan orientasi perjuangan di kalangan tokoh pergerakan nasional dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman politik, serta persepsi masing-masing kelompok terhadap situasi kolonial yang mereka hadapi. Kondisi ini semakin mengemuka menjelang terjadinya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ketika situasi politik internasional mengalami perubahan yang sangat cepat akibat kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II.

Golongan tua pada umumnya terdiri dari para pemimpin yang telah lama berkiprah dalam organisasi pergerakan nasional sejak dekade awal abad ke-20. Sukarno dan Mohammad Hatta merupakan figur sentral yang merepresentasikan kelompok ini. Kahin (2013) mencatat bahwa para tokoh senior ini memiliki rekam jejak panjang dalam menghadapi tekanan pemerintah kolonial dan mengelola organisasi pergerakan, sehingga membentuk pola pikir yang lebih kalkulatif dan berhati-hati, terutama dalam menghadapi situasi yang berpotensi memicu konflik terbuka dengan kekuatan militer yang masih berkuasa. Selain itu, golongan tua memiliki pengalaman dalam melakukan perjuangan melalui jalur organisasi dan diplomasi politik. Menurut Kartodirdjo (1993), pengalaman panjang dalam organisasi pergerakan membuat golongan tua cenderung memilih strategi yang lebih realistis dan mempertimbangkan berbagai faktor politik serta keamanan sebelum mengambil langkah yang bersifat revolusioner.

Berbeda halnya dengan golongan muda, yang merupakan generasi penerus dengan semangat revolusioner tinggi dan tekad kuat untuk segera merealisasikan kemerdekaan. Sutan Sjahrir, Wikana, dan Chairul Saleh adalah di antara tokoh-tokoh yang merepresentasikan kelompok ini. Suryana dan Permana (2022) menjelaskan bahwa generasi muda ini tumbuh di tengah iklim pergerakan nasional yang semakin matang, sehingga membentuk kesadaran politik yang tajam mengenai urgensi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Orientasi ideologis golongan muda banyak dibentuk oleh arus pemikiran nasionalisme modern serta dinamika politik global yang mendorong gelombang kemerdekaan di berbagai penjuru dunia. Anderson (2006) menjelaskan bahwa selama pendudukan Jepang, berbagai organisasi kepemudaan dan semi-militer memberikan ruang bagi

generasi muda untuk terlibat aktif dalam aktivitas politik dan militer, yang pada gilirannya membentuk watak yang lebih radikal dan berani dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Perbedaan pengalaman dan latar belakang inilah yang pada akhirnya melahirkan divergensi strategi dalam menyikapi jalan menuju kemerdekaan. Vickers (2013) memaparkan bahwa golongan tua cenderung memilih jalur yang penuh kalkulasi, yakni mempertimbangkan respons pihak Jepang maupun Sekutu sebelum mengambil langkah, karena mereka sadar bahwa kesalahan strategi dapat berakibat fatal bagi keberlangsungan perjuangan. Sebaliknya, golongan muda memandang bahwa kehati-hatian berlebihan justru berisiko menghilangkan momentum bersejarah yang tidak akan terulang. Mulyadi dan Rahmawati (2021) menegaskan bahwa semangat golongan muda untuk bertindak cepat dilandasi oleh keyakinan bahwa kemerdekaan yang sejati hanya dapat lahir dari inisiatif bangsa Indonesia sendiri, bukan dari persetujuan atau pemberian pihak manapun. Hal ini membuktikan bahwa perbedaan ideologi dan strategi antara kedua golongan bukan sekadar perdebatan teoritis, melainkan memiliki dampak nyata terhadap arah dinamika politik menjelang proklamasi kemerdekaan. Wifaqi dan Chamidah (2024) menyimpulkan bahwa meskipun sempat terjadi ketegangan yang cukup tajam, kedua kelompok pada akhirnya berhasil mencapai titik kesepakatan yang melahirkan negara Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945.

Pendekatan Diplomatis Golongan Tua

Golongan tua memiliki keyakinan bahwa kemerdekaan yang kokoh harus dibangun di atas fondasi politik, hukum, dan administratif yang kuat, bukan sekadar lahir dari deklarasi sepihak. Latif (2020) menjelaskan bahwa para pemimpin senior seperti Sukarno dan Hatta memahami bahwa pembentukan negara yang berdaulat membutuhkan lebih dari sekadar pengumuman kemerdekaan – ia memerlukan kesiapan institusi pemerintahan, kerangka ideologi negara, serta legitimasi yang dapat diakui oleh komunitas internasional. Dalam kerangka itulah golongan tua memanfaatkan berbagai lembaga yang difasilitasi oleh pemerintah Jepang sebagai wahana persiapan kemerdekaan yang terstruktur. BPUPKI yang dibentuk pada tahun 1945 menjadi salah satu instrumen strategis yang digunakan untuk merancang fondasi negara, mulai dari dasar negara, sistem pemerintahan, hingga rancangan konstitusi. Anderson (2006) mencatat bahwa lembaga-lembaga ini menjadi arena penting bagi para tokoh nasional untuk mengonsolidasikan gagasan tentang bentuk dan arah negara Indonesia yang akan merdeka.

Salah satu capaian terpenting dari sidang BPUPKI adalah lahirnya rumusan dasar negara yang dikemukakan Sukarno pada 1 Juni 1945 dan kemudian dikenal sebagai Pancasila. Latif (2020) menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar produk sidang formal, melainkan kristalisasi dari pemikiran kebangsaan yang telah matang di kalangan golongan tua selama bertahun-tahun. Setelah BPUPKI dibubarkan, pemerintah Jepang membentuk PPKI sebagai lembaga lanjutan yang bertugas menuntaskan persiapan kemerdekaan. Ricklefs (2010) menjelaskan bahwa PPKI memiliki peran krusial dalam menyusun kerangka pemerintahan awal, termasuk pembentukan struktur eksekutif dan pengesahan konstitusi negara. Bagi golongan tua, keberadaan lembaga-lembaga ini menjadi jaminan bahwa proses kemerdekaan berjalan secara terorganisasi dan memiliki legitimasi politik yang memadai di mata komunitas internasional.

Pendekatan diplomatis yang dilakukan oleh golongan tua juga dipengaruhi oleh pertimbangan terhadap situasi politik internasional pada saat itu. Pendekatan yang digunakan oleh para pemimpin nasional seperti Sukarno dan Hatta menunjukkan adanya strategi politik yang realistis dalam menghadapi situasi yang kompleks pada masa tersebut (Kahin, 2013). Strategi diplomatis golongan tua sesungguhnya bukan bentuk kepasifan, melainkan cerminan kesadaran strategis yang mendalam. Reid (2011) mencatat bahwa para pemimpin senior memahami bahwa kemerdekaan yang diproklamasikan tanpa kesiapan kelembagaan yang memadai berpotensi menciptakan instabilitas politik jangka panjang yang justru merugikan bangsa Indonesia itu sendiri. Kumalasari dan Efendi (2023) menyimpulkan bahwa meskipun terkesan lambat di mata golongan muda, strategi diplomatis golongan tua justru menjadi pilar penyeimbang yang memastikan kemerdekaan Indonesia lahir tidak hanya sebagai fakta politik, tetapi juga sebagai entitas negara yang memiliki fondasi ideologis dan kelembagaan yang kokoh.

Pendekatan Revolusioner Golongan Muda

Berbeda dengan golongan tua yang mengutamakan pendekatan diplomatis, golongan muda mengambil sikap yang jauh lebih tegas dan revolusioner dalam memandang proses kemerdekaan. Bagi mereka, kemerdekaan

adalah hak mutlak bangsa Indonesia yang harus diwujudkan melalui tindakan mandiri dan berani, tanpa harus menunggu persetujuan dari pihak pendudukan Jepang atau mengikuti prosedur lembaga bentukan pemerintah militer. Putri dan Hidayat (2023) menegaskan bahwa bagi golongan muda, legitimasi kemerdekaan justru terletak pada kemurnian inisiatif bangsa sendiri, bukan pada pengakuan atau restu pihak luar.

Di antara tokoh-tokoh yang merepresentasikan golongan muda adalah Sutan Sjahrir, Wikana, dan Chairul Saleh – generasi aktivis yang memiliki semangat nasionalisme membara dan keberanian untuk mendorong perubahan secara cepat. Fitriani dan Saputra (2022) mengungkapkan bahwa jaringan komunikasi yang kuat di kalangan aktivis muda menjadi salah satu kekuatan utama kelompok ini dalam menggerakkan desakan terhadap para pemimpin nasional untuk segera mengambil langkah tegas. Pandangan revolusioner golongan muda juga dipengaruhi oleh situasi politik global yang berkembang pada akhir Perang Dunia II. Menurut Anderson (2006), proses mobilisasi pemuda selama masa pendudukan Jepang telah menciptakan generasi yang memiliki kesadaran politik yang kuat serta kesiapan untuk mengambil tindakan revolusioner dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Golongan muda berpandangan bahwa menggantungkan proklamasi pada persetujuan Jepang justru akan menggerogoti legitimasi kemerdekaan di mata dunia. Apabila kemerdekaan lahir melalui lembaga yang dibentuk oleh kekuatan pendudukan, maka kemerdekaan itu berpotensi dipandang sebagai hadiah dari Jepang, bukan hasil perjuangan murni bangsa Indonesia. Adi, Maulida, dan Rohman (2025) memperkuat argumen ini dengan menyatakan bahwa kemerdekaan yang autentik mensyaratkan inisiatif dan keputusan yang sepenuhnya lahir dari kesadaran dan kehendak kolektif bangsa itu sendiri. Mulyadi dan Rahmawati (2021) menyimpulkan bahwa tanpa tekanan revolusioner dari golongan muda, proses diplomasi golongan tua berpotensi berlangsung jauh lebih lambat dan kemerdekaan bisa saja tertunda. Dengan demikian, dinamika antara pendekatan revolusioner golongan muda dan pendekatan diplomatis golongan tua menjadi elemen dialektis yang saling menguatkan dalam proses lahirnya negara Indonesia merdeka.

Peristiwa Rengasdengklok sebagai Puncak Konflik

Ketegangan antara golongan muda dan golongan tua dalam menentukan strategi menuju kemerdekaan Indonesia mencapai titik puncaknya dalam Peristiwa Rengasdengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Peristiwa ini terjadi ketika para pemuda membawa Sukarno dan Mohammad Hatta ke daerah Rengasdengklok, sebuah wilayah yang terletak di Karawang, Jawa Barat. Tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan kedua pemimpin nasional tersebut dari pengaruh Jepang sekaligus mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu persetujuan dari pihak Jepang.

Akar peristiwa ini terletak pada perbedaan mendasar antara golongan muda dan golongan tua mengenai kapan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Fitriani dan Saputra (2022) menjelaskan bahwa kekhawatiran utama golongan muda adalah kemungkinan kembalinya kekuatan kolonial Belanda yang dibonceng oleh tentara Sekutu, sehingga proklamasi harus dilakukan sesegera mungkin sebagai fakta politik yang tidak dapat dibatalkan. Sementara itu, golongan tua tetap berpegang pada pendiriannya untuk tidak terburu-buru. Putri dan Hidayat (2023) mencatat bahwa Sukarno dan Hatta mempertimbangkan dengan cermat berbagai konsekuensi geopolitik dari tindakan proklamasi, termasuk kemungkinan reaksi militer Jepang yang masih bersenjata di Indonesia, sehingga setiap langkah harus diambil dengan kalkulasi yang matang.

Menurut Kartodirdjo (1993), Peristiwa Rengasdengklok mencerminkan dinamika hubungan antara generasi muda dan generasi tua dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Golongan muda yang memiliki semangat revolusioner berusaha mendorong perubahan secara cepat, sementara golongan tua lebih mengutamakan pertimbangan politik yang lebih luas. Meski sempat menciptakan ketegangan yang nyata, Peristiwa Rengasdengklok tidak berujung pada perpecahan yang berkepanjangan. Kumalasari dan Efendi (2023) menjelaskan bahwa melalui serangkaian dialog dan negosiasi intensif, kedua kelompok berhasil mencapai kesepakatan mengenai waktu proklamasi. Setelah Sukarno dan Hatta kembali ke Jakarta pada malam 16 Agustus 1945, para tokoh pergerakan segera mengadakan pertemuan untuk merampungkan rumusan teks proklamasi kemerdekaan.

Dengan demikian, Peristiwa Rengasdengklok dapat dipahami sebagai titik krusial dalam perjalanan sejarah kemerdekaan Indonesia. Peristiwa tersebut tidak hanya menunjukkan adanya perbedaan strategi antara golongan muda dan golongan tua, tetapi juga memperlihatkan bagaimana dialog dan kompromi politik mampu

menyatukan berbagai pandangan yang berbeda demi mencapai tujuan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia.

Kompromi Politik dan Lahirnya Proklamasi

Setelah melalui serangkaian perdebatan yang intens, kedua golongan akhirnya mencapai kesepakatan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Prasetyo dan Wulandari (2021) menyebut proses ini sebagai bentuk resolusi konflik ideologis yang produktif, di mana perbedaan orientasi tidak dihapuskan, melainkan dikelola melalui kompromi yang menghasilkan keputusan kolektif yang lebih kuat dari sekadar satu pandangan saja. Suryana dan Permana (2022) mencatat bahwa pertemuan para tokoh pergerakan yang berlangsung di kediaman Laksamana Maeda malam itu menjadi titik balik penting, di mana desakan golongan muda dan kematangan strategis golongan tua akhirnya bertemu dalam satu keputusan bulat untuk segera mengumandangkan kemerdekaan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Kompromi antara kedua golongan itu akhirnya mewujudkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kahin (2013) menggarisbawahi bahwa keberhasilan ini merupakan bukti nyata dari kematangan politik bangsa Indonesia – di mana golongan muda memberikan tekanan revolusioner yang memastikan momentum tidak terlewatkan, sementara golongan tua memastikan bahwa proklamasi dilaksanakan secara terstruktur dan memiliki legitimasi politik yang kuat sebagai fondasi negara yang baru lahir. Herlina (2020) menegaskan bahwa dialektika antara dua pendekatan yang berbeda justru menghasilkan keputusan yang lebih kaya dan lebih kuat secara historis daripada jika hanya satu kutub ideologi yang menentukan arah perjuangan.

Prasetyo dan Wulandari (2021) menegaskan bahwa konflik ideologis dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak bersifat destruktif, melainkan justru menjadi mekanisme resolusi yang menghasilkan keputusan politik yang lebih matang. Dengan demikian, perbedaan pandangan antara golongan muda dan golongan tua tidak seharusnya dipandang semata sebagai hambatan, melainkan sebagai kekuatan dialektis yang memperkaya strategi perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaannya. Lahirnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan hasil dari sinergi antara semangat revolusioner golongan muda dan strategi diplomatis golongan tua yang saling melengkapi.

KESIMPULAN

Perbedaan ideologi antara golongan muda dan golongan tua menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan salah satu dinamika penting dalam proses perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perbedaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perbedaan usia atau generasi, tetapi juga mencerminkan perbedaan pengalaman politik, cara pandang terhadap situasi internasional, serta strategi yang dianggap paling efektif dalam mencapai kemerdekaan. Golongan muda cenderung mengedepankan pendekatan revolusioner yang menekankan pentingnya tindakan cepat dan tegas untuk memanfaatkan momentum politik yang muncul akibat melemahnya kekuasaan Jepang pada akhir Perang Dunia II. Sebaliknya, golongan tua lebih memilih pendekatan diplomatis yang mempertimbangkan berbagai aspek politik, keamanan, serta kemungkinan reaksi dari kekuatan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia.

Perbedaan pandangan tersebut pada awalnya menimbulkan ketegangan politik yang cukup signifikan antara kedua kelompok. Ketegangan tersebut mencapai puncaknya dalam Peristiwa Rengasdengklok yang menjadi simbol kuat dari perbedaan strategi perjuangan antara generasi muda dan generasi tua. Meskipun sempat terjadi perbedaan pandangan yang cukup tajam, kedua kelompok pada akhirnya mampu mencapai kesepakatan melalui proses dialog dan kompromi politik yang menghasilkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dengan demikian, kemerdekaan Indonesia dapat dipahami sebagai hasil dari sinergi antara semangat revolusioner yang diperjuangkan oleh golongan muda dan strategi diplomatis yang dijalankan oleh golongan tua. Kedua pendekatan tersebut memiliki peran yang sama pentingnya dalam mendorong tercapainya kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, dinamika hubungan antara golongan muda dan golongan tua menjelang proklamasi kemerdekaan tidak seharusnya dipandang sebagai konflik semata, tetapi sebagai proses historis yang menunjukkan bagaimana perbedaan pandangan dapat menghasilkan keputusan bersama yang menentukan arah perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat kerangka analisis konflik ideologis antargenerasi sebagai mekanisme dialektika dalam historiografi nasional. Temuan penelitian ini

menunjukkan bahwa kompromi antara dua kutub ideologi – revolusioner dan diplomatis – bukan merupakan bentuk kelemahan, melainkan kematangan politik yang menghasilkan keputusan bersejarah. Implikasi teoritis ini relevan tidak hanya dalam konteks sejarah Indonesia, tetapi juga dapat menjadi referensi perbandingan bagi kajian gerakan kemerdekaan di negara-negara Asia Tenggara lainnya yang mengalami proses dekolonisasi serupa. Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk mendalami perspektif pelaku sejarah melalui analisis sumber primer seperti memoir, surat, dan arsip negara, guna memperkaya pemahaman tentang dinamika ideologis yang melatarbelakangi lahirnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Daftar Pustaka

- Adi, A. P., Maulida, D. R. W., & Rohman, L. A. (2025). Rekonseptualisasi nasionalisme pemuda Indonesia dalam era digital. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*.
- Anderson, B. (2006). *Java in a time of revolution: Occupation and resistance, 1944–1946*. Ithaca: Cornell University Press.
- Fitriani, E., & Saputra, D. (2022). Peristiwa Rengasdengklok dalam perspektif konflik generasional: Analisis historis-sosiologis. *Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah*.
- Herlina, N. (2020). *Metode sejarah (Edisi revisi)*. Bandung: Satya Historika.
- Kahin, G. M. (2013). *Nasionalisme dan revolusi di Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Kartodirdjo, S. (1993). *Pengantar sejarah Indonesia baru: Sejarah pergerakan nasional dari kolonialisme sampai nasionalisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kumalasari, D., & Efendi, A. (2023). Dinamika politik menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia: Antara diplomasi dan revolusi. *Jurnal Sejarah dan Budaya*.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar ilmu sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Latif, Y. (2020). *Wawasan Pancasila: Bintang penuntun untuk pembudayaan*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Loomba, A. (2005). *Colonialism/Postcolonialism (2nd ed.)*. London: Routledge.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Mulyadi, S., & Rahmawati, D. (2021). Nasionalisme dan konstruksi identitas bangsa Indonesia menjelang kemerdekaan 1945: Kajian historiografi kritis. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah*.
- Prasetyo, B., & Wulandari, F. (2021). Konflik ideologi dan resolusi politik dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia 1945: Perspektif historiografi kritis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Putri, R. A., & Hidayat, M. T. (2023). Diplomasi Sukarno-Hatta dan konstruksi legitimasi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*.
- Reid, A. (2011). *Indonesia rising: The repositioning of Asia's third giant*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Ricklefs, M. C. (2010). *Sejarah Indonesia modern 1200–2008*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Suryana, A., & Permana, R. H. (2022). Gerakan pemuda dan konstruksi identitas nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia 1945. *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*.
- Vickers, A. (2013). *A history of modern Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wifaqi, H., & Chamidah, N. (2024). Proklamasi 1945: Tonggak sejarah menuju kemerdekaan Indonesia. *Dinamika Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.